

BAB I PENDAHULUAN

Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 1945 di Indonesia, ditinjau dari perspektif histories, adalah tepat jika disebut dengan istilah “revolusi”. Revolusi Indonesia, menurut Sartono Kartodirdjo, merupakan proses politik yang penuh dengan konflik antara golongan, pemberontakan massa terhadap tatanan yang ada dan hal ini hamper tidak pernah terjadi sebelum atau sesudahnya.¹ Anthony Reid mengatakan bahwa “revolusi sosial” merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk mengoreksi “revolusi nasional Indonesia” dalam mencapai perubahan yang menyeluruh.²

Pada umumnya yang menarik dari sejarah revolusi Indonesia adalah bukan saja fakta-fakta tentang peristiwanya, tetapi juga bagaimana wajah atau gambaran tentang peristiwa-peristiwanya itu. Revolusi Indonesia sebagai sejarah yang diingat (remembered history), merupakan masa pergolakan (bahasa Jawa gegeran) yang ditandai dengan serobotan, gedoran, dan pendaulatandisamping masa perjuangan.³ Istilah-istilah itu sebenarnya menunjukkan adanya situasi krisis yang penuh dengan konflik antar golongan yang siap menggunakan cara-cara radikal dan kekerasan.

Revolusi sosial di Kabupaten Brebes, sebagai aksi masyarakat terhadap pengreh praja yang dianggap sebagai perpanjangan tangan penjajah, merupakan suatu pergolakan yang perlu dicatat dalam sejarah perjuangan bangsa. Pergolakan

¹ Sartono Kaartodirdjo, Wajah Revolusi Indonesia Dipandang Dari Perspektifisme struktuel. Prisma Nomer 8 Jakarta : LP3ES, 1981, Hal. 3

² Anthony Reid, Revolusi Sosial : Revolusi Nasional Nomr.8 Jakarta: LP3ES, 1981. Hal 83

³ Kartodirdjo, Look.Cit

rakyat Kabupaten Brebes ini, merupakan bagian dari peristiwa Tiga Daerah yang kita kenal selama ini yang terjadi antara bulan oktober sampai Desember 1945. Ketiga daerah yang bergolak ini (Brebes, Tegal, dan Pemalang), adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Karesidenan Pekalongan Jawa Tengah.

Sebagai peristiwa local, pergolakan ini juga menunjukkan keaneragaman pencerminan, yang disamping memiliki sifat-sifat umum juga memiliki sifat-sifat yang khusus. Salah satu cirri dari pergolakan ini antara lain adalah sifat protesnya, yang mirip dengan pergolakan social yang terjadi pada pada jaman colonial. Sifat protes ini mencerminkan suatu jawaban social terhadap arus perubahan yang datang dari tingkat permukaan nasional kedalam lingkungan local. Tingkat respon sosialnya banyak sedikitnya ditentukan oleh drajat lokalitasnya.⁴

Pergolakan semacam ini juga terjadi di Solo dan Delanggu. Pergolakan di Solo atau Surakarta,⁵ terkenal dengan munculnya Gerakan Anti Swapraja. Di Delanggu terkenal dengan pemogokan Delanggu. Ketiga peristiwa ini, yaitu peristiwa Tiga Daerah (Brebes, Tegal, Pemalang), Gerakan Anti Swapraja, dan pemogokan Delanggu merupakan [peristiwa local yang timbul sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang sedang terjadi galam skala nasional. Mengingat sifatnya yang local, maka pergolakan-pergolakan ini sering disebut sebagai “Revolusi Sosial”.⁶

⁴ Djoko Suryo, Pergolakan Daerah diawal Revolusi: Kasus di Daerah Pekalongan. Prisma, Nomer 12 Jakarta: LP3ES, 1978, hal 77

⁵ Ben Anderson, “Java in a Time of Revolution, occupation and recistance, 1944-1946 “, Alih Bahasa Jiman Rumbo, *Revolusi Pemuda: pendudukna Jepng dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Mulia Sari, Pustaka Sinar Harapan, 1966, hal 404.

⁶ Suryo, Op.Cit hal.76

Proklamasi Kemerdekaan 1945, menurut anggapan rakyat berarti musnahnya unsur-unsur colonial, termasuk pengreh praja yang dianggap sebagai birokrat bentukan colonial. Bulan-bulan berikutnya setelah proklamasi mulai menunjukkan adanya pergolakan rakyat yang menuntut kebebasan dari segala belenggu selama penjajahan. Pergolakan rakyat Kabupaten Brebes adalah sebagai fakta histories “adanya Revolusi Sosial” sekitar proklamasi Kemerdekaan 1945.

Sebelum melakukan penulisan karya sejarah, kajian pustaka dan penggunaan historiografi yang relevan merupakan merupakan suatu hal yang pokok yang tidak dapat ditinggalkan dalam penulisan karya sejarah kritis. Historiografi adalah rekonstruksi sejarah melalui peruses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁷ Historiografi tidak hanya buku-buku yang berbau sejarah tetapi juga dapat diambil dari disertasi, tesis, skripsi, yang dapat dipertanggung jawabkan kevalidannya. Hanya berpedoman pada karya-karya yang memenuhi syarat, suatu karya sejarah dengan bersifat obyektif, meskipun dalam kenyataannya subyektifitas dalam penulisan sejarah tidak dapat dihindarkan.

Seperti halnya dengan beberapa kasus revolusi social di Solo dan Delanggu, kasus Cumbok di Pidie, revolusi social di Kabupaten Brebes pada dasarnya disebabkan oleh salah penafsiran akan berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diterima rakyat di seluruh Indonesia dengan penuh semangat yang bergelora. Tetapi di beberapa tempat, akibat salah penafsiran tentang proklamasi ini

⁷ F.R.Ankersmith, Refleksi Tentang Sejarah Jakarta: PT. Gramedia, 1984, hlm.268.

menimbulkan tindakan yang sering kali berbeda dengan yang dikehendaki oleh para pemimpin pusat. Dengan diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia, rakyat beranggapan bahwa semua unsur colonial termasuk penghuni praja yang dianggap sebagai personifikasi pemerintah colonial dan sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat harus dimusnahkan.

Revolusi Sosial di Kabupaten Brebes, yang merupakan bagian dari revolusi nasional secara keseluruhan, perlu pengkajian yang khusus tentang makna dan legalitasnya. Ini bukan menyesali sejarah yang unik sifatnya, melainkan mengemukakan pemikiran bahwa betapa sempit pandangan pemerintah pusat dalam menanggapi revolusi sosial di Kabupaten Brebes pada waktu itu. Karena revolusi sosial di kabupaten Brebes itu ada dan terjadi, bahkan ekor revolusi Indonesia ini nampaknya lebih besar dari kepalanya yaitu revolusi nasional, maka perlu pengarahannya dan pelurusan bukan mengharamkannya, seperti halnya pandangan Soekarno yang menganggap pergolakan sosial di Kabupaten Brebes ini sebagai gerakan separatis semata.

Kabupaten Brebes semasa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, merupakan daerah yang secara langsung mengalami kesengsaraan akibat eksploitasi yang dilakukan pihak penjajah. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda menimbulkan dampak hilangnya kebebasan bagi petani dalam menanam sawah oleh perkebunan-perkebunan tebu. Di samping kerugian karena lahan pertaniannya terbengkalai, petani juga harus memikul beban pajak yang sangat berat dan penyerahan tenaga secara paksa. Keadaan seperti ini berlanjut ketika pemerintah militer Jepang datang

menggantikan posisi pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan atas tanah milik rakyat Indonesia. Bahkan semua penjajahan ini penderitaan rakyat semakin memuncak dengan adanya romusa.

Pergolakan social di Kabupaten Brebes ini ditandai dengan aksi pendaulatan terhadap penghreh praja setempat, pembunuhan terhadap orang-orang Indo, Cina, Manado dan Ambon, serta perampasan terhadap perusahaan-perusahaan milik asing. Aksi ini pada dasarnya merupakan luapan emosi rakyat terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan selama penjajahan. Pengreh praja dituduh rakyat sebagai yang bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat selama penjajahan, sebab politik colonial yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah militer Jepang menempatkan penghreh praja dan elit birokrat lainnya sebagai pelaksana kepentingan colonial.

Kejadian-kejadian dalam revolusi social di Kabupaten Brebes menunjukkan bersatunya unsure kiri dan kaum agama selama bulan-bulan pertama revolusi. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan yang mereka rasakan bersama selama penjajahan sanggup menyatakan semua golongan. Salah satu hal yang menarik dalam revolusi social di Kabupaten Brebes adalah adanya demokratisasi bahasa sebagai salah satu tujuan perjuangan mereka. Aksi kekerasan yang mewarnai kejadian-kejadian selama berlangsungnya pergolakan social di Kabupaten Brebes, dimungkinkan masih besarnya peranan kaum lenggaong di tengah masyarakat sebagai wakil dari tradisi protespetani Jawa yang menginginkan masyarakat adil dan makmur akibat penindasan dan kesengsaraan selama colonial.

Revolusi social di Kabupaten Brebes, berakhir setelah TKR bersama kaum Islam yang tidak setuju terhadap teindakan pemerintahan revolusioner bertindak dan menangkap para tokoh rvolusi. Dalam sekala yang lebih kecil, revolusi social di Kabupaten Brebes dapat dikatakan sebagai bentrokan pertama antara PKI dengan golongan militer. Adapun penyebab mengapa pemerintah pusat pada mulanya tidak memberi perhatian pada revolusi social di Kabupaten brbes, karena saat itu Republik sedang memusatkan perhatian pada kedatangan kembali NICA yang membonceng tentara sekutu. Ideology yang dianut perdana menteri syahrir yang pada dasarnya sepaham dengan apa yang terjadi harus diambil oleh pemerintah pusat. Sebagai bagian dari revolusi Indonesia secara keseluruhan, revolusi social di Kabupaten Brebes membuktikan semangat revolusioner rakyat yang menyala dalam menaggapi proklamasi kemerdekaan Indonesia.